

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007

'BPH Migas harus ikut bertanggung jawab'

Oleh RUDI ARIFFIANTO & MULIA GINTING MUNTHE
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pertamina menilai Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas) harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah selain disebabkan adanya penyalahgunaan produk migas tersebut.

Dirut Pertamina Ari Sumarno menjelaskan pengawasan soal penyaluran minyak tanah dilakukan antara BPH Migas dan Pertamina. BUMN itu tidak menerima semua persoalan kelangkaan itu diakibatkan oleh mereka.

"BPH Migas mesti ikut bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan minyak tanah. Kami hanya bergerak pada batas kuota yang diberikan. Kami andalkan pengawasan yang dilakukan bersama, dan juga tentunya BPH Migas. Silakan cari jalan keluarnya, jangan kemudian dituduhkan bahwa pasokan kurang atau karena program konversi," katanya kemarin.

Dia menegaskan tuduhan pengkaitan antara kelangkaan minyak tanah dengan program konversi tidak mendasar. Namun, dia mengakui penyaluran minyak tanah saat ini memang bermasalah. "Kembali lagi pada masalah klasik bahwa minyak tanah itu terjadi gap yang tinggi sekali an-

tara harga keekonomian dengan harga eceran subsidi. Ya begini, masuk pangkalan semua, orang langsung antre."

Harga eceran minyak tanah bersubsidi paling tinggi hanya Rp3.000 per liter. Bahkan ada yang masih di bawah harga itu. Harga untuk industri sekitar Rp6.000 per liter. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan telah ditemukan banyak masyarakat yang antre untuk mendapatkan minyak tanah.

Berkaitan dengan itu, Dirut Pertamina itu menegaskan penyebab semua itu diakibatkan adanya penyalahgunaan minyak tanah di lapisan masyarakat. "Banyak pihak yang menggunakan minyak tanah di luar peruntukan."

Lucunya, tambah dia, berapa pun volume minyak tanah yang dikeluarkannya langsung habis terserap konsumen. Pertamina, tegasnya, tetap menjamin pasokan minyak tanah sesuai kuota untuk setiap dae-

rah.

Tahun ini, total kuota minyak tanah mencapai sekitar 9,9 juta kiloliter untuk seluruh Indonesia. Tahun ini juga pemerintah menargetkan bisa melakukan konversi minyak tanah bersubsidi 319.000 kiloliter dan dikonversi dengan elpiji 181.000 ton. Program

yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun diharapkan juga bisa terjadi penghematan dana subsidi sebesar Rp1,28 triliun.

Di tempat terpisah, Wapres Jusuf Kalla seperti dikutip dari *Antara* telah memerintahkan Pertamina agar bisa mendistribusikan gas untuk program konversi minyak tanah ke gas seperti distribusi minyak tanah sampai ke kampung-kampung.

"Saya minta PT Pertamina lakukan persis seperti distribusi minyak tanah. Kalau dulu ada pedagang keliling [dengan gerobak] tawarkan minyak... minyak. Sekarang harus ada yang jalan gas-gas," kata Wapres M. Jusuf Kalla sambil menggerakkan kedua tangannya menirukan aksi pedagang minyak keliling, ketika ditanyakan soal program konversi minyak

Rencana konversi minyak tanah subsidi ke elpiji

Minyak tanah bersubsidi	9,9 juta kiloliter
Target pengurangan minyak tanah	988.280 kiloliter
Nilai pengurangan subsidi	Rp3,8 triliun
Penambahan elpiji pengganti minyak tanah	567.767 ton/tahun
Harga jual elpiji	Rp3.864/kg
Harga beli elpiji	Rp6.853/kg
Kebutuhan subsidi elpiji	Rp1,96 triliun
Penghematan	Rp1,93 triliun
Kerugian PT Pertamina	Rp2,99 triliun
Perlu tambahan subsidi (defisit)	Rp1,06 triliun

Sumber: Ditjen Anggaran Depkeu dan Departemen ESDM

tanah ke gas, kemarin.

Menurut Wapres, program konversi minyak tanah ke gas tersebut saat ini sudah berjalan. Namun, diakuinya memang masih ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan. Namun, tambahannya hal itu biasa dan harus diperbaiki.

Komprior gas gratis

Sementara itu, Kemenkop dan UKM kemarin melakukan penyerahan perdana kompor gas gratis kepada masyarakat miskin di Kelurahan Cibodas, Tangerang, Banten. Di daerah itu diharapkan bisa diserahkan sebanyak 42.000 unit kompor gas Khususnya terhadap keluarga pengguna kompor minyak tanah.

"Persyaratan untuk mendapat kompor dan tabung, di antaranya

harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) daerah setempat," ujar Deputi Bidang Produksi Kemenkop dan UKM Muzni H.A. Djalil selaku penanggung jawab program.

Selain itu, penerima harus bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanah ke elpiji serta tidak bisa mengalihkannya ke orang

lain. Satu rumah tangga hanya diperkenankan menerima satu kompor.

Meski Kemenkop sudah siap menyalurkan kompor pada 9 Juli, rekanan mereka PT Bimadaya Inti Dinamika sebagai perusahaan Penanggung jawab distribusi kompor dan pencacah calon penerima, ternyata belum siap.

Hingga Jumat siang, calon penerima yang sudah berhasil didata hanya 1.000 KK. Jumlah ini masih jauh dari penyaluran 42.000 unit kompor. Namun, Muzni optimistis distribusi dan pencacahan itu bisa diselesaikan.

"Memang ada kendala di lapangan termasuk soal jumlah KK yang menerima kompor gas gratis. Saya optimistis soal itu bisa diselesaikan."

(rudi.ariffianto@bisnis.co.id/ginting.munthe@bisnis.co.id)